

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan perwujudan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN memiliki dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Tujuan BUMN yang dijelaskan pada pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Berdasarkan data dari idx, BUMN non-keuangan yang tercatat dalam BEI ada sebanyak 25 perusahaan.



Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2019-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02% dengan PDB perkapita Rp59,1 Juta. Namun, pada tahun 2020 menurun sebesar 2,07% dengan PDB perkapita Rp 56,9 Juta. Penurunan ini terjadi karena pergerakan perekonomian yang kurang stabil akibat terjadinya pandemi. Pada tahun 2021 dan 2022 PDB tumbuh sebesar 3,70% dan 5,31% dengan PDB perkapita masing-masing Rp62,2 Juta dan Rp71 Juta (*Badan Pusat Statistik, 2024*).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian pada BUMN non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022 sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan laporan hasil akhir yang berisi pencatatan dan transaksi dalam bisnis yang menjadi acuan alat pertanggungjawaban perusahaan untuk menunjukkan kondisi finansial perusahaan (Novita et al., 2024). Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan.

Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu dengan mengubah ataupun menyembunyikan informasi material dan merupakan kegiatan manajemen yang ilegal (Hartanto, 2023). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, fraud terbagi menjadi tiga kategori yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Hasil survei ACFE tahun 2019 menunjukkan bahwa kasus kecurangan laporan keuangan persentase terjadinya sebanyak 9% (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2022). Namun, hal ini akan berdampak bagi perusahaan karena mempengaruhi pengambilan keputusan oleh investor, kreditor, dan hal lain.

Kasus kecurangan laporan keuangan sering terjadi pada perusahaan. Beberapa kasus yang terjadi yaitu PT Waskita Karya Tbk. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menduga terdapat rekayasa laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang telah dilakukan sejak lama, disebutkan bahwa terdapat laporan yang tak wajar sejak 2016 (Neraca.co.id, 2023). Sementara itu, pada tahun 2022 terdapat dugaan manipulasi laporan keuangan di PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk telah membongkar fakta bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) baru hanya untuk formalitas (Tirto.id, 2023).

Adapun kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi di PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2019, kementerian keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima oleh PT Garuda Indonesia setelah penandatanganan perjanjian, sehingga hal tersebut berdampak pada laporan laba rugi PT Garuda Indonesia (Kemenkeu, 2019).

Selanjutnya, kementerian BUMN menyebutkan bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan menduga terdapat pemalsuan laporan keuangan PT Wijaya Karya. Pada tahun 2022, di laporan keuangan tercatat rugi

bersih konsolidasian sebesar Rp59,6 miliar, dibandingkan laba bersih konsolidasian Rp117,67 miliar di tahun 2021. Sedangkan pendapatan bersih konsolidasian sebesar Rp21,48 triliun atau naik 20,67% dibandingkan Rp17,80 triliun di tahun 2021 (Tirto.id, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Pertama yaitu koneksi politik. Koneksi politik antara direktur perusahaan dengan pejabat pemerintahan dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan suatu perusahaan. Koneksi politik perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan risiko perusahaan. Koneksi politik yang melekat pada BUMN berfungsi sebagai mekanisme penghindaran risiko (Widyaningrum & Wijayanti, 2022). Hasil penelitian Agustin et al. (2022) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian (Hartanto, 2023) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Adapun faktor berikutnya yaitu opini audit. Opini Audit merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun Kantor Akuntan Publik memberikan opini wajar, masih terdapat kemungkinan terjadi salah saji material sehingga mengindikasikan dapat terjadi kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian (Novita et al., 2024) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan pada penelitian (Nadya, 2024) opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Faktor yang terakhir yaitu *CEO power*. *CEO Power* dianggap sebagai pemusatan kekuasaan ada di tangan CEO, yang mengukur seberapa besar kekuasaan pengambilan keputusan oleh CEO (Pour et al., 2023). KPK sudah beberapa kali memberikan peringatan mengenai rawannya pejabat yang memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Tingginya kemungkinan konflik kepentingan akibat rangkap jabatan dapat menjerumuskan orang kepada tindak kecurangan. Hasil penelitian Widyatama & Setiawati (2020) menyatakan bahwa *CEO power* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan pada

penelitian Agustin et al. (2022) menyatakan bahwa *CEO power* tidak memiliki pengaruh signifikan pada kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti apakah koneksi politik, opini audit dan *CEO power* berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan. Oleh karena itu, judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah **“Pengaruh Koneksi Politik, Opini Audit, dan *CEO Power* Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi pada BUMN Non-Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Kecurangan laporan keuangan merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia dan dapat dilakukan oleh perusahaan manapun. Hal ini perlu dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan perubahan. Kedudukan kelembagaan dari pejabat publik dan pihak yang terlibat dapat digunakan untuk melacak tindakan kecurangan laporan keuangan, karena itu koneksi politik dapat menjadi faktor terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, opini audit masih belum efektif untuk membantu karena masih ditemukan beberapa kasus kecurangan laporan keuangan meskipun opini yang didapatkan WTP. Saat ini, cukup sering ditemukan pemimpin yang merangkap jabatan di eksekutif dan partai politik, akibatnya pejabat bersangkutan dapat memanfaatkan jabatannya atau *CEO power* untuk kepentingan sendiri dan dapat menimbulkan kecurangan laporan keuangan. Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang kecurangan laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang kemudian menjadi referensi untuk penelitian ini. Karena masih terdapat kasus yang ditemukan, diperlukan pengujian kembali. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi indikasi kecurangan laporan keuangan meliputi koneksi politik, opini audit, dan *CEO power*. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah koneksi politik, opini audit, *CEO power* dan indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan di tahun 2019-2022?

2. Apakah koneksi politik, opini audit, *CEO power* mempunyai pengaruh secara simultan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan di tahun 2019-2022?
3. Apakah koneksi politik mempunyai pengaruh secara parsial terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan di tahun 2019-2022?
4. Apakah opini audit mempunyai pengaruh secara parsial terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan di tahun 2019-2022?
5. Apakah *CEO power* mempunyai pengaruh secara parsial terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan di tahun 2019-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana koneksi politik, opini audit, *CEO power* dan indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan di tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui apakah koneksi politik, opini audit, *CEO power* mempunyai pengaruh secara simultan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan di tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui apakah koneksi politik mempunyai pengaruh secara parsial terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan di tahun 2019-2022.
4. Untuk mengetahui apakah opini audit mempunyai pengaruh secara parsial terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan di tahun 2019-2022.
5. Untuk mengetahui apakah *CEO power* mempunyai pengaruh secara parsial terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan di tahun 2019-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Aspek teoritis dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain mengenai hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta informasi mengenai pengaruh koneksi politik, opini audit, *CEO power* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat kajian yang lebih jelas dalam bahasan ini.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat yang ingin dicapai dari segi praktis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh koneksi politik, opini audit, *CEO power* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami praktik *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan guna memberantas kecurangan laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam proses penelitian, sistematika penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu BUMN, latar belakang penelitian yang menjelaskan tentang variabel dependen yaitu indikasi kecurangan laporan keuangan serta fenomena dan penelitian sebelumnya yang berkaitan, perumusan masalah dan tujuan penelitian terkait koneksi politik, opini audit, *CEO power*, dan kecurangan laporan keuangan pada BUMN non-keuangan serta pengaruh secara simultan maupun parsial, manfaat penelitian dalam aspek teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan yaitu teori fraud. Penelitian terdahulu terkait indikasi kecurangan laporan keuangan sebagai variabel dependen serta koneksi politik, opini audit, dan CEO *power* sebagai variabel independen sehingga menggambarkan kerangka pemikiran penelitian dan ditutup dengan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, menguraikan operasionalisasi variabel penelitian antara lain koneksi politik, opini audit, CEO *power* dan indikasi kecurangan laporan keuangan, menentukan populasi dan sampel, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, dan metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan dari deskripsi data objek penelitian BUMN non-keuangan, memberikan hasil analisis data dari setiap variabel yaitu koneksi politik, opini audit, CEO *power* dan indikasi kecurangan laporan keuangan yang telah diteliti serta memberikan pembahasan hasil dari analisis data tersebut melalui statistik deskriptif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian koneksi politik, opini audit, CEO *power* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, disajikan keterbatasan penelitian serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.